



Otoritas Politik dan Elite Sosial dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu terhadap *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'*

Fitra Dana Hasibuan*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: fitradana1304@gmail.com

Muhammad Ali Azmi Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: muhammadaliazminst@uinsu.ac.id

Nur Fadhilah Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	14 Juli 2026	21 Agustus 2026	22 September 2026	29 September 2026

Abstract

The construction of political authority and the configuration of social elites in the Qur'an require a reading that goes beyond a normative approach that is often merely descriptive, as such a framework often ignores the dynamics of meaning that form within the network of Qur'anic concepts. This study aims to uncover the meaning structure of *Ūlī al-Amr* and *al-Malā'* and the conceptual relationship between them through Toshihiko Izutsu's semantic approach. The method used is qualitative, based on a literature study, with an analysis of the basic meaning as the lexical meaning attached to the word, as well as the relational meaning formed in the field of meaning through its relationship with other concepts in the Qur'an. The results of the study show that *Ūlī al-Amr* has a relational character as a normative authority that gains legitimacy through its attachment to the values of revelation, obedience, and moral responsibility in maintaining social order. On the other hand, *al-Malā'* represents a social elite that operates within a framework of power based on status, wealth, and collective influence, with a tendency to build dominance and resistance to the messages of the prophets. The conceptual relationship between the two demonstrates a dichotomy between authority grounded in normative legitimacy and power rooted in social hegemony. The theoretical implications of this study emphasize the Qur'an's conceptual distinction between legitimate, ethically oriented authority and power structures that tend to uphold the interests of dominant groups.

Keywords: *Ūlī al-Amr*; *al-Malā'*; Semantic Analysis; Political Authority; Social Elite

Abstrak

Konstruksi otoritas politik dan konfigurasi elite sosial dalam Al-Qur'an memerlukan pembacaan yang melampaui pendekatan normatif yang cenderung deskriptif, sebab kerangka demikian sering mengabaikan dinamika makna yang terbentuk dalam jaringan konsep Qur'ani. Kajian ini bertujuan mengungkap struktur makna *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* serta relasi konseptual di antara keduanya melalui pendekatan semantik Toshihiko Izutsu.

Metode yang digunakan bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis terhadap makna dasar sebagai arti leksikal yang melekat pada kata, serta makna relasional yang terbentuk dalam medan makna melalui keterkaitannya dengan konsep lain dalam Al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan *Ūlī al-Amr* memiliki karakter relasional sebagai otoritas normatif yang memperoleh legitimasi melalui keterikatan pada nilai wahyu, ketaatan, serta tanggung jawab moral dalam menjaga keteraturan sosial. Di sisi lain, *al-Malā'* merepresentasikan elite sosial yang beroperasi dalam kerangka kekuasaan berbasis status, kekayaan, dan pengaruh kolektif, dengan kecenderungan membangun dominasi serta resistensi terhadap risalah para nabi. Relasi konseptual keduanya menampilkan dikotomi antara otoritas yang berlandaskan legitimasi normatif dan kekuasaan yang bertumpu pada hegemoni sosial. Implikasi teoretis dari kajian ini menegaskan diferensiasi konseptual dalam Al-Qur'an antara otoritas sah yang berorientasi etis dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan kepentingan kelompok dominan.

Kata Kunci: *Ūlī al-Amr*; *al-Malā'*; Analisis Semantik; Otoritas Politik; Elite Sosial

Pendahuluan

Otoritas politik dan struktur elite sosial merupakan dua tema penting dalam diskursus Al-Qur'an yang terus memicu perdebatan konseptual dalam kajian Islam kontemporer. Pembacaan terhadap konsep kekuasaan sering berfokus pada legitimasi normatif tanpa mengurai relasi makna yang membentuk struktur konseptual Al-Qur'an secara utuh (Pratiwi et al., 2026). Istilah *Ūlī al-Amr* sering dipahami sebagai representasi otoritas yang sah (Sirry, 2021), sedangkan *al-Malā'* kerap diposisikan sebagai simbol kelompok elite yang menentang risalah kenabian (Yusuf et al., 2021). Pendekatan yang terlalu normatif cenderung mengabaikan dimensi semantik yang secara sistematis menghubungkan kedua konsep tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemahaman yang parsial terhadap struktur otoritas yang dibangun dalam Al-Qur'an. Analisis semantik memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam melalui penelusuran jaringan makna antarkonsep kunci. Toshihiko Izutsu (2002) menawarkan kerangka metodologis yang menempatkan makna sebagai bagian dari sistem relasional yang membentuk pandangan dunia dalam Al-Qur'an.

Perkembangan diskursus politik Islam modern menunjukkan meningkatnya perdebatan terkait legitimasi kekuasaan dan peran elite sosial dalam struktur masyarakat Muslim. Fenomena kontestasi otoritas muncul dari perbedaan tafsir terhadap konsep kepemimpinan yang berakar pada teks keagamaan. Praktik politik kontemporer sering menampilkan klaim legitimasi berbasis agama yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai etis dalam Al-Qur'an (Bahri et al., 2024). Data empiris yang dipublikasikan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan kecenderungan munculnya elite yang mempertahankan dominasi melalui simbol keagamaan, sementara legitimasi normatif sering diposisikan sebagai alat justifikasi kekuasaan (Williamson et al., 2023). Realitas ini memperlihatkan adanya jarak antara konsep otoritas yang ideal dalam Al-Qur'an dan praktik sosial yang berkembang. Representasi elite dalam bentuk *al-Malā'*

menemukan relevansi baru dalam konteks modern sebagai kelompok yang mengendalikan struktur sosial dan politik (Yusuf et al., 2021). Sementara itu, konsep *Ūlī al-Amr* sering direduksi menjadi legitimasi formal tanpa analisis terhadap batas makna yang melekat pada istilah tersebut (Dar, 2022). Kondisi ini menuntut kajian yang mampu mengurai struktur makna secara lebih mendalam agar dapat menjelaskan relasi antara otoritas normatif dan kekuatan sosial dalam kerangka konseptual Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep otoritas dan elite sosial dalam Al-Qur'an melalui berbagai pendekatan. Studi Duraković (2023) mengenai *Ūlī al-Amr* dalam tafsir klasik menekankan makna sebagai pemegang kekuasaan politik atau ulama yang memiliki otoritas keagamaan, namun analisis ini cenderung bersifat normatif dan tidak menelusuri relasi makna dengan konsep lain dalam sistem Al-Qur'an. Penelitian Abdullah (2024) yang menggunakan pendekatan historis menyoroti peran *al-Malā'* dalam kisah para Nabi sebagai kelompok elite penentang risalah, namun kajian ini berhenti pada deskripsi naratif tanpa membangun analisis semantik. Bakour (2025) menempatkan *Ūlī al-Amr* sebagai dasar legitimasi kekuasaan modern, namun pendekatan ini tidak mengkritisi batas konseptual yang membedakan otoritas normatif dan dominasi sosial sehingga berpotensi menyederhanakan makna.

Di sisi lain, Azhdaryzadeh dan Amini (2024) telah mencoba membaca ulang relasi antara kekuasaan dan masyarakat dalam Al-Qur'an berbasis hermeneutika, namun belum mengintegrasikan analisis semantik sebagai alat utama untuk mengungkap jaringan makna. Studi Badrun et al. (2023) yang secara khusus menggunakan pendekatan Izutsu lebih banyak berfokus pada konsep etika dan teologi tanpa menempatkan *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* sebagai bagian dari satu sistem konseptual yang saling berelasi. Seluruh temuan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang terletak pada ketiadaan analisis semantik komprehensif yang menghubungkan kedua konsep dalam satu kerangka makna yang utuh. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan analisis semantik Izutsu untuk menelaah relasi makna antara *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* secara sistemik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur otoritas dan elite sosial dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang berfokus pada struktur makna *Ūlī al-Amr*, karakter semantik *al-Malā'*, relasi konseptual antara keduanya, serta konstruksi otoritas yang terbentuk dalam sistem makna Al-Qur'an. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengungkap jaringan makna yang membentuk konsep otoritas dan elite sosial melalui pendekatan semantik Izutsu. Argumen awal menempatkan Al-Qur'an sebagai sistem makna yang tidak hanya memuat norma, tetapi juga membangun struktur konseptual yang kompleks melalui relasi antar istilah kunci. Pemahaman terhadap otoritas tidak dapat dilepaskan dari posisinya dalam jaringan makna yang lebih luas. Analisis terhadap *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'*

memungkinkan identifikasi batas antara otoritas yang sah dan dominasi sosial yang menyimpang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi tafsir berbasis semantik serta memperkaya kajian politik Islam melalui pembacaan yang lebih konseptual. Kontribusi lain terletak pada penyediaan kerangka analisis yang mampu menjelaskan relasi antara bahasa, makna, dan struktur sosial dalam Al-Qur'an secara lebih sistematis dan mendalam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis semantik yang merujuk pada kerangka Toshihiko Izutsu, yang tidak hanya menelaah makna leksikal, tetapi juga menempatkan konsep dalam jaringan makna relasional Al-Qur'an secara sistematis. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat istilah *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'*, sedangkan data sekunder mencakup karya-karya tafsir klasik dan kontemporer serta literatur teoritis terkait semantik Al-Qur'an dan pemikiran Izutsu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi ayat secara tematik, klasifikasi berdasarkan konteks kemunculan, serta inventarisasi relasi konseptual antarterm yang berasosiasi dalam satu medan makna. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap melalui penelusuran makna dasar setiap term, dilanjutkan dengan analisis makna relasional melalui pemetaan jaringan semantik yang menghubungkan konsep dengan istilah lain dalam struktur Al-Qur'an, kemudian dilakukan pembacaan sinkronik untuk melihat posisi konseptual dalam sistem nilai yang utuh, serta pendalaman interpretasi dengan mengintegrasikan dimensi linguistik dan konseptual guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konstruksi otoritas dan elite sosial dalam Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Makna *Ūlī al-Amr* dalam Al-Qur'an

Istilah *Ūlī al-Amr* dalam Al-Qur'an berpusat pada Surah al-Nisā' [4]: 59 yang memuat konstruksi perintah ketaatan berlapis melalui relasi "*aṭī'ū Allāh wa aṭī'ū al-Rasūl wa ulī al-Amr minkum*", lalu dipertegas oleh Surah al-Nisā' [4]: 83 yang mengaitkan otoritas pengelolaan informasi dengan kemampuan *istinbāṭ* kelompok tertentu. Kedua ayat ini menghadirkan medan semantik yang berbeda namun saling mengikat: ayat pertama menampilkan struktur normatif ketaatan, sedangkan ayat kedua menegaskan fungsi epistemik dalam pengambilan keputusan publik. Toshihiko Izutsu (2002) menempatkan ayat-ayat kunci sebagai simpul yang memancarkan jaringan makna, sehingga keberadaan *Ūlī al-Amr* dipahami sebagai titik relasional dalam sistem nilai Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, makna tidak berdiri pada definisi leksikal tunggal, melainkan terbentuk dari oposisi, asosiasi, serta korespondensi dengan konsep lain yang beroperasi dalam keseluruhan wacana wahyu.

Analisis makna dasar mengharuskan pembacaan terhadap unsur leksikal *Ūlī* dan *al-Amr* secara terpisah sebelum dirangkaikan. Bentuk *Ūlī* merupakan jamak dari *dhū* yang menandai kepemilikan atau keterhubungan erat dengan sesuatu, sehingga mengindikasikan subjek yang memiliki kapasitas tertentu secara inheren (Ibn Manzūr, 1999). *Al-Amr* mengandung spektrum arti yang luas, mencakup perintah, urusan, dan otoritas untuk mengatur (Al-Jawharī, 1987). Menurut Arthur Jeffery (1958), akar kata *amr* dalam bahasa Arab pra-Islam telah berfungsi sebagai penanda tindakan komando dan pengelolaan urusan kolektif, lalu Al-Qur'an mengintensifkan dimensi normatifnya melalui asosiasinya dengan kehendak Ilahi. Kombinasi dua unsur menghasilkan konstruksi semantik yang menunjuk pada pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelola urusan publik dalam kerangka nilai yang ditentukan oleh wahyu, sehingga makna dasar tidak berhenti pada "pemegang kekuasaan", melainkan bergerak menuju "pemilik otoritas yang terikat pada norma".

Eksplorasi makna relasional memperlihatkan interaksi erat antara *Ūlī al-Amr* dengan konsep *ṭā'ah*, *rasūl*, dan *amr*. Dalam Surah al-Nisā' [4]: 59, pengulangan verba *aṭī'ū* untuk Allah dan Rasul, lalu disusul dengan penyebutan *Ūlī al-Amr* tanpa pengulangan verba yang sama, membentuk hierarki implisit yang menunjukkan tingkat otoritas yang berbeda. Izutsu (2002) menafsirkan struktur ini sebagai indikasi bahwa ketaatan kepada *Ūlī al-Amr* memperoleh legitimasi melalui relasinya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan sebagai sumber yang berdiri sendiri. Konsep *ṭā'ah* sendiri beroperasi sebagai kategori etis yang menautkan tindakan manusia dengan kehendak Ilahi, sehingga hubungan antara tiga entitas tersebut menciptakan jaringan makna yang bersifat hierarkis sekaligus kondisional. Relasi dengan Rasul memperkuat dimensi profetik, sedangkan keterkaitan dengan *amr* menegaskan fungsi pengaturan sosial, sehingga menghasilkan konfigurasi makna yang menggabungkan otoritas normatif dan otoritas operasional.

Penempatan *Ūlī al-Amr* dalam struktur otoritas Al-Qur'an menunjukkan adanya jembatan antara dimensi Ilahi dan realitas sosial. Menurut Fazlur Rahman (1980), Al-Qur'an membangun etika sosial melalui internalisasi prinsip-prinsip wahyu ke dalam praktik komunitas, sehingga figur otoritas berfungsi sebagai mediator nilai, bukan sebagai sumber nilai. Posisi ini menempatkan *Ūlī al-Amr* sebagai bagian dari mekanisme penerjemahan norma transenden ke dalam kebijakan yang konkret. Struktur demikian menghindari dikotomi antara sakral dan profan, sebab otoritas sosial memperoleh makna melalui keterkaitannya dengan wahyu. Relasi ini menghasilkan konfigurasi di mana legitimasi berasal dari kesesuaian dengan kerangka normatif Al-Qur'an. Konsekuensinya, otoritas menjadi fungsi dari integrasi antara kapasitas manusia dan tuntunan Ilahi, sehingga keberadaannya selalu berada dalam ruang evaluasi etis.

Karakter otoritas yang tidak absolut tampak melalui syarat implisit kesesuaian dengan wahyu sebagai dasar legitimasi. Nasr Hamid Abu Zayd (2002) menekankan bahwa teks Al-Qur'an mengonstruksi otoritas melalui proses interpretasi yang

selalu terbuka terhadap evaluasi kritis, sehingga tidak ada entitas sosial yang memperoleh kekuasaan mutlak. Dalam konteks ini, perintah ketaatan kepada *Ūlī al-Amr* tidak dapat dipisahkan dari prinsip rujukan kembali kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum dalam lanjutan Surah al-Nisā' [4]: 59. Mekanisme rujukan tersebut berfungsi sebagai alat koreksi terhadap kemungkinan penyimpangan dari otoritas. Struktur semantik ini mengindikasikan bahwa ketaatan bersifat bersyarat, sehingga otoritas kehilangan legitimasi ketika bertentangan dengan prinsip wahyu.

Batas konseptual otoritas dalam Al-Qur'an dapat dilihat melalui relasi antara *Ūlī al-Amr* dan konsep *amr* sebagai kehendak Ilahi. Menurut Izutsu (2002), *amr* dalam Al-Qur'an sering merujuk pada keputusan Allah yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga setiap bentuk otoritas manusia harus ditempatkan dalam subordinasi terhadap kehendak tersebut. Keterikatan ini menciptakan batas yang jelas antara otoritas manusiawi dan otoritas Ilahi, sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan sosial tidak pernah mencapai tingkat absolut. Struktur ini juga mengandung implikasi epistemologis, sebab pengetahuan tentang kehendak Ilahi menjadi prasyarat bagi pelaksanaan otoritas yang sah. Relasi antara *amr* sebagai perintah Ilahi dan *amr* sebagai urusan sosial menghasilkan dialektika yang membatasi sekaligus mengarahkan praktik kekuasaan dalam kerangka nilai transenden.

Penegasan mengenai sifat relasional konsep *Ūlī al-Amr* memperlihatkan bahwa istilah ini tidak menunjuk pada entitas statis dengan identitas tetap, melainkan pada posisi fungsional yang ditentukan oleh jaringan makna dalam Al-Qur'an. Muhammad Arkoun (1994) menyoroti pentingnya membaca konsep-konsep Qur'ani sebagai bagian dari sistem diskursif yang dinamis, sehingga makna terbentuk melalui interaksi antarkonsep, bukan melalui definisi tunggal. Perspektif ini memungkinkan pemahaman bahwa *Ūlī al-Amr* dapat merujuk pada berbagai bentuk otoritas sepanjang memenuhi kriteria relasional yang ditetapkan dalam teks, termasuk kapasitas epistemik, integritas moral, serta keterikatan pada wahyu. Konsep ini bergerak mengikuti konteks sosial tanpa kehilangan orientasi normatif, sehingga fleksibilitasnya tetap berada dalam batas-batas sistem nilai Al-Qur'an.

Karakter Semantik *al-Malā'* sebagai Representasi Elite Sosial dalam Al-Qur'an

Istilah *al-malā'* muncul secara berulang dalam berbagai kisah para Nabi dan menandai kehadiran suatu kelompok sosial dengan karakter spesifik yang konsisten dalam seluruh narasi. Inventarisasi ayat menunjukkan kemunculannya dalam kisah Nabi Nuh, Hud, Salih, Musa, serta Fir'aun sebagai figur kekuasaan yang terhubung erat dengan kelompok elite ini. Redaksi Al-Qur'an menempatkan *al-Malā'* sebagai aktor kolektif yang berbicara, menilai, dan memobilisasi penolakan terhadap pesan-pesan profetik. Struktur kebahasaan ayat-ayat tersebut mengindikasikan posisi sosial yang mapan, terlihat dari pola ujaran yang otoritatif dan merepresentasikan kepentingan komunitas dominan. Dalam kisah Nabi Musa, *al-Malā'* hadir di sekitar

Fir'aun sebagai lingkaran kekuasaan yang menopang legitimasi politiknya (Hazaymeh, 2026). Dalam kisah Nabi Nuh, Hud, dan Salih, kelompok ini berperan sebagai pengarah opini publik yang berusaha mendiskreditkan risalah tersebut (Haleem, 2006). Pola distribusi semantik ini memperlihatkan konsistensi fungsi sosial *al-Malā'* sebagai elite yang terintegrasi dalam struktur dominasi, bukan sekadar kelompok individu berpengaruh secara sporadis.

Makna dasar *al-Malā'* dapat ditelusuri melalui akar kata yang mengandung nuansa "kepenuhan" atau "keberlimpahan", yang secara semantik bergeser menjadi penanda kelompok yang "memenuhi ruang sosial" dengan pengaruh dan otoritas (Ibn Farīs, 1979). Izutsu (2002) menekankan pendekatan medan makna yang menempatkan sebuah term dalam jaringan relasionalnya, sehingga *al-Malā'* dipahami sebagai konsep yang terikat pada struktur nilai tertentu. Dalam kerangka ini, *al-Malā'* mengacu pada kelompok yang memiliki kapasitas hegemonik untuk menentukan norma sosial dan arah politik. Fazlur Rahman (1980), secara terpisah, membaca istilah ini sebagai representasi aristokrasi tribal yang menguasai sumber daya ekonomi dan simbolik, sehingga mampu mengontrol narasi kolektif masyarakat. Perbedaan penekanan kedua pemikir ini memperkaya pemahaman konseptual, di mana Izutsu menyoroti relasi semantik, sedangkan Rahman menegaskan dimensi historis-sosiologis. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa *al-Malā'* berfungsi sebagai kategori konseptual yang menjembatani antara struktur bahasa dan realitas sosial dalam Al-Qur'an.

Jaringan relasional *al-Malā'* dalam medan makna Al-Qur'an memperlihatkan keterkaitannya dengan konsep *istikbār*, *kufr*, dan *ṭāghūt*. Relasi ini tidak bersifat kebetulan, melainkan membentuk pola semantik yang konsisten. Istilah *istikbār* menandai sikap kesombongan kolektif yang menjadi ciri utama elite, terlihat dari penolakan terhadap otoritas profetik yang dianggap mengancam posisi sosial mereka (Asy-Sya'rāwī, 1997). Konsep *kufr* muncul sebagai konsekuensi epistemologis dari sikap tersebut, yaitu penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan wahyu (Quṭb, 2004). Keterkaitan dengan *ṭāghūt* memperluas dimensi analisis ke arah struktur kekuasaan yang melampaui batas legitimasi moral. Izutsu (2002) menunjukkan bahwa makna suatu term menjadi jelas melalui oposisi dan asosiasinya, sehingga *al-Malā'* dapat dipahami sebagai simpul dalam jaringan konsep yang menggambarkan penyimpangan dari nilai-nilai ilahi. Analisis ini mengungkap bahwa elite sosial berfungsi sebagai agen produksi makna yang bertentangan dengan sistem nilai wahyu.

Kemunculan *al-Malā'* sebagai aktor oposisi terhadap risalah menunjukkan pola naratif yang sistematis dan berulang. Setiap kisah para Nabi memperlihatkan interaksi antara Nabi sebagai pembawa pesan dan elite sebagai penolak utama. Narasi tidak sekadar menggambarkan konflik personal, melainkan konflik struktural antara otoritas wahyu dan otoritas sosial. Dalam kisah Nabi Salih, *al-Malā'* berusaha mempertahankan struktur kekuasaan dengan delegitimasi pesan

kenabian melalui tuduhan irasionalitas. Dalam kisah Nabi Hud, mereka memanfaatkan posisi sosial untuk membangun resistensi kolektif. Dalam kisah Musa, elite berfungsi sebagai perpanjangan kekuasaan Fir'aun yang mengonsolidasikan dominasi politik. Mustansir Mir (2011) menekankan bahwa pola naratif Al-Qur'an memiliki koherensi tematik yang memperlihatkan hubungan antara karakter dan fungsi sosialnya, sehingga kehadiran *al-Malā'* merupakan bagian dari struktur makna yang konsisten.

Karakter sosial-politik *al-Malā'* dapat dibaca sebagai penjaga status quo yang beroperasi melalui mekanisme dominasi simbolik dan material. Posisi mereka memungkinkan kontrol atas sumber daya ekonomi, jaringan komunikasi, serta legitimasi sosial. Fungsi ini tercermin dalam cara mereka membingkai risalah sebagai ancaman terhadap stabilitas, sehingga resistensi tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga bersifat strategis. Arkoun (2019), dalam pendekatan kritisnya terhadap wacana Islam klasik, menyoroti bagaimana elite sering kali mengonstruksi ortodoksi untuk mempertahankan kekuasaan. Perspektif ini relevan untuk membaca *al-Malā'* sebagai aktor yang mengelola produksi pengetahuan demi kepentingan dominasi. Struktur kekuasaan yang mereka bangun bekerja melalui legitimasi sosial yang tampak alami. Analisis ini menunjukkan bahwa *al-Malā'* berperan sebagai agen reproduksi struktur sosial yang menghambat transformasi nilai yang dibawa oleh wahyu.

Fungsi struktural *al-Malā'* dalam membangun resistensi terhadap otoritas profetik dapat dipahami melalui perannya sebagai mediator antara kekuasaan politik dan masyarakat luas. Mereka tidak hanya menolak pesan Nabi, melainkan juga mengorganisasi penolakan tersebut menjadi gerakan kolektif. Proses ini melibatkan strategi retorika, mobilisasi sosial, serta kontrol terhadap opini publik. Dalam kisah Nabi Nuh, elite menggunakan argumen status sosial untuk menolak kesetaraan yang ditawarkan risalah. Dalam kisah Musa, mereka memperkuat narasi ancaman terhadap stabilitas kerajaan. Izutsu (2002) menegaskan bahwa makna suatu konsep dalam Al-Qur'an sering kali terkait dengan fungsinya dalam struktur naratif, sehingga *al-Malā'* harus dipahami sebagai elemen yang menghubungkan pesan teologis dengan dinamika sosial. Fungsi ini memperlihatkan bahwa resistensi terhadap wahyu terorganisasi melalui struktur elite yang memiliki kapasitas koordinatif.

Simbolisasi *al-Malā'* sebagai kekuatan sosial yang cenderung menyimpang dari nilai wahyu merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan analisis medan makna. Representasi ini bersifat kolektif dan struktural, sehingga mencerminkan pola umum dalam relasi antara kekuasaan dan kebenaran. Izutsu menempatkan simbol sebagai hasil dari relasi semantik yang kompleks, sehingga *al-Malā'* berfungsi sebagai simbol dominasi yang menolak transformasi etis. Fazlur Rahman menambahkan dimensi historis yang memperlihatkan bagaimana pola ini berulang dalam berbagai konteks sosial. Integrasi kedua perspektif memperkuat

argumen bahwa *al-Malā'* bukan sekadar istilah deskriptif, melainkan kategori analitis yang mengungkap dinamika kekuasaan dalam Al-Qur'an. Keseluruhan konstruksi makna ini menunjukkan bahwa elite sosial memiliki kecenderungan struktural untuk mempertahankan dominasi, sekaligus menolak nilai yang mengancam posisi mereka, sehingga menjadikan *al-Malā'* sebagai simbol permanen dari resistensi terhadap otoritas wahyu dalam wacana Qur'ani.

Relasi Semantik antara *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* dalam Struktur Otoritas Al-Qur'an

Analisis semantik terhadap *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* menyingkap konfigurasi medan makna yang bergerak dalam dua orbit berbeda, meskipun keduanya beririsan dalam domain kepemimpinan sosial. *Ūlī al-Amr* hadir sebagai konsep yang berakar pada struktur normatif wahyu, menandai otoritas yang terikat pada prinsip ketaatan dan keteraturan ilahiah, sedangkan *al-Malā'* beroperasi dalam ruang sosial yang ditopang oleh kekuatan kolektif elite, pengaruh simbolik, dan dominasi kultural. Perbandingan medan makna menunjukkan pergeseran aksentuasi dari legitimasi berbasis nilai menuju legitimasi berbasis kekuasaan sosial. Relasi ini memperlihatkan ketegangan antara dua sistem nilai yang membentuk orientasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an. *Ūlī al-Amr* mengonstruksi otoritas melalui keterhubungan dengan prinsip Ilahiah yang mengarahkan tindakan kolektif menuju keteraturan moral (Saptono, Khozen, & Jie, 2023), sedangkan *al-Malā'* membangun pengaruh melalui kontrol atas struktur sosial dan opini publik (Yusuf et al., 2021). Pertemuan keduanya dalam ranah kepemimpinan menciptakan ruang dialektika yang memperlihatkan bagaimana otoritas dapat dimaknai secara berlapis dalam horizon semantik Al-Qur'an.

Kesamaan antara kedua konsep muncul pada dimensi fungsi sosial yang mengandaikan keberadaan figur atau kelompok yang memegang peran sentral dalam mengarahkan masyarakat. *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* sama-sama berada dalam posisi strategis sebagai penentu arah kolektif, baik melalui mekanisme normatif maupun dominasi sosial. Fungsi ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Al-Qur'an dipahami sebagai struktur relasional yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan komunitas. Titik temu ini memperlihatkan bahwa otoritas, dalam berbagai bentuknya, selalu beroperasi dalam jaringan sosial yang kompleks, di mana pengaruh dan ketaatan saling berkelindan. Namun, kesamaan fungsi tersebut tidak menghapus perbedaan mendasar dalam sumber legitimasi. *Ūlī al-Amr* memperoleh validitas dari keterikatan pada prinsip wahyu, sedangkan *al-Malā'* mengandalkan legitimasi sosial yang terbentuk melalui kekuatan ekonomi, politik, dan simbolik. Ketegangan antara dua sumber legitimasi ini memperlihatkan adanya dualitas dalam struktur otoritas yang diuraikan dalam Al-Qur'an.

Perbedaan mendasar antara legitimasi normatif dan legitimasi sosial menjadi kunci untuk memahami oposisi semantik antara kedua konsep tersebut. *Ūlī al-Amr* beroperasi dalam kerangka ketaatan yang bersifat integral, di mana otoritas terikat

pada prinsip transenden yang mengatur batas dan arah kekuasaan. Legitimasi ini meniscayakan adanya keselarasan antara tindakan pemimpin dan nilai-nilai Ilahiah, sehingga otoritas diukur dari kesesuaian moral. Sebaliknya, *al-Malā'* merepresentasikan bentuk legitimasi yang bersumber dari konsolidasi kekuatan sosial, yang sering kali tidak terikat pada prinsip moral yang transenden. Dominasi menjadi ciri utama, di mana kekuasaan dipertahankan melalui kontrol atas sumber daya dan pengaruh terhadap kesadaran kolektif. Oposisi ini menegaskan perbedaan antara otoritas yang bersifat integratif dan otoritas yang bersifat hegemonik, sekaligus memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an membangun hierarki nilai yang secara tegas membedakan keduanya.

Oposisi konseptual antara ketaatan dan pembangkangan memperdalam pemahaman tentang relasi semantik yang terbentuk. *Ūlī al-Amr* diasosiasikan dengan pola ketaatan yang mengarah pada stabilitas sosial dan keteraturan normatif, di mana kepemimpinan berfungsi sebagai medium untuk merealisasikan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan kolektif. Ketaatan dalam konteks ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keseimbangan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral. Sebaliknya, *al-Malā'* sering kali terhubung dengan pola pembangkangan terhadap nilai-nilai transenden, terutama ketika dominasi sosial digunakan untuk mempertahankan status quo yang bertentangan dengan prinsip wahyu. Pembangkangan ini tidak selalu tampil secara eksplisit, melainkan dapat termanifestasi melalui manipulasi wacana dan pengendalian struktur sosial. Kontras ini memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an mengonstruksi kategori moral yang membedakan antara otoritas yang mendukung keteraturan Ilahiah dan otoritas yang berpotensi merusak tatanan tersebut.

Relasi antara integrasi dan dominasi menjadi aspek lain yang memperkaya analisis semantik. *Ūlī al-Amr* mencerminkan model kepemimpinan yang berorientasi pada integrasi, di mana otoritas berfungsi untuk menyatukan berbagai elemen sosial dalam kerangka nilai yang koheren. Integrasi ini bersifat normatif karena melibatkan internalisasi nilai-nilai Ilahiah dalam kehidupan kolektif. *Al-Malā'* justru memperlihatkan kecenderungan dominatif, di mana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan hierarki sosial dan memperkuat posisi elite. Dominasi ini sering kali menghasilkan fragmentasi sosial karena kepentingan kelompok tertentu ditempatkan di atas kepentingan kolektif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan evaluasi normatif terhadap cara kekuasaan dijalankan. Integrasi diposisikan sebagai ideal, sedangkan dominasi dipandang sebagai potensi penyimpangan yang harus dikritik.

Struktur nilai Al-Qur'an memperlihatkan bagaimana kedua konsep tersebut ditempatkan dalam jaringan makna yang saling berinteraksi. *Ūlī al-Amr* berada dalam orbit nilai yang mencakup ketaatan, keadilan, dan keteraturan, sehingga membentuk sistem semantik yang koheren dan terarah. *Al-Malā'* ditempatkan dalam jaringan yang sering kali berasosiasi dengan kesombongan, penolakan, dan

resistensi terhadap perubahan moral. Penempatan ini mencerminkan upaya Al-Qur'an untuk membangun peta moral yang jelas bagi para pembacanya. Relasi struktural antara kedua konsep menunjukkan adanya proses diferensiasi yang bertujuan untuk membedakan antara otoritas yang sah dan yang tidak sah. Diferensiasi ini bersifat operasional, karena memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kepemimpinan. Struktur nilai yang terbentuk menjadi dasar evaluasi moral terhadap berbagai bentuk otoritas yang muncul dalam kehidupan sosial.

Dinamika pembentukan otoritas dalam Al-Qur'an memperlihatkan pergeseran dari basis kekuatan sosial menuju legitimasi wahyu. *Ūlī al-Amr* merepresentasikan fase ketika otoritas dikaitkan dengan prinsip Ilahiah, sehingga kekuasaan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai transenden. *Al-Malā'* mencerminkan fase di mana kekuasaan masih sangat bergantung pada struktur sosial dan dominasi elite. Perbandingan ini menunjukkan adanya transformasi konseptual yang mengarah pada redefinisi otoritas dalam kerangka wahyu. Transformasi ini menempatkannya dalam posisi yang harus tunduk pada prinsip moral yang lebih tinggi. Proses ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mengarahkan agar kekuasaan tersebut berfungsi dalam kerangka nilai yang benar.

Penegasan terhadap otoritas yang sah dan yang tidak sah menjadi puncak dari relasi semantik yang dianalisis. *Ūlī al-Amr* diposisikan sebagai representasi otoritas yang memperoleh legitimasi dari keselarasan dengan wahyu, sehingga memiliki dasar moral yang kokoh. *Al-Malā'* diposisikan sebagai representasi otoritas yang berpotensi menyimpang ketika tidak terikat pada prinsip-prinsip Ilahiah. Distingsi ini memiliki implikasi praktis dalam pembentukan kesadaran sosial. Al-Qur'an, melalui struktur semantik yang kompleks, menuntun pembaca untuk membedakan antara kepemimpinan yang mengarah pada keteraturan moral dan kepemimpinan yang mengarah pada dominasi tanpa batas.

Konsep Otoritas Politik dan Struktur Elite dalam Perspektif Semantik Izutsu

Kerangka semantik yang dibangun melalui pendekatan Izutsu memungkinkan integrasi makna *Ūlī al-Amr* dan *al-Malā'* ke dalam satu konfigurasi konseptual yang menampilkan relasi kompleks antara wahyu, kepemimpinan, dan struktur sosial. Analisis medan makna menunjukkan bahwa otoritas politik dalam Al-Qur'an terbentuk melalui jaringan relasi yang menghubungkan legitimasi normatif dengan praktik sosial. *Ūlī al-Amr* mengandung dimensi ketaatan yang berakar pada sumber transenden, sementara *al-Malā'* merepresentasikan konfigurasi elite yang beroperasi dalam ruang sosial konkret. Integrasi kedua konsep ini memperlihatkan adanya diferensiasi ontologis antara otoritas yang memperoleh legitimasi dari wahyu dan dominasi yang bertumpu pada kekuatan sosial. Relasi ini membentuk struktur makna yang dinamis, di mana otoritas dipahami sebagai fungsi etis yang terikat pada prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab kolektif. Pendekatan Izutsu mengungkap bahwa jaringan konsep tersebut bekerja secara sistemik,

sehingga setiap istilah memperoleh makna melalui posisinya dalam keseluruhan struktur semantik.

Formasi otoritas dalam perspektif Al-Qur'an memperlihatkan hubungan triangulatif antara wahyu sebagai sumber normatif, kepemimpinan sebagai agen implementatif, dan masyarakat sebagai ruang aktualisasi nilai. Struktur ini menghasilkan model otoritas yang interaktif dan relasional. Kepemimpinan memperoleh legitimasi dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai wahyu yang menuntut integritas moral. Masyarakat berfungsi sebagai medan verifikasi terhadap otoritas, sehingga legitimasi terus diuji melalui praktik sosial. Dalam kerangka ini, *Ūlī al-Amr* mengandung tuntutan moral yang mengikat tindakan kepemimpinan. Relasi ini membedakan secara tegas antara otoritas yang sah secara normatif dan dominasi yang lahir dari akumulasi kekuatan sosial. Struktur semantik yang terbentuk menunjukkan bahwa otoritas dalam Al-Qur'an berakar pada prinsip keterhubungan antara nilai Ilahiah dan realitas sosial, sehingga kekuasaan kehilangan legitimasi ketika terlepas dari dimensi etis.

Diferensiasi antara otoritas normatif dan dominasi sosial menjadi elemen kunci dalam memahami konstruksi makna yang dihasilkan melalui analisis semantik. Otoritas normatif beroperasi dalam kerangka nilai yang mengikat, di mana legitimasi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral (Ahmed, 2025). Dominasi sosial, sebaliknya, berakar pada struktur kekuatan yang dapat berkembang tanpa landasan etik yang kuat (Bhojani & Clarke, 2023). Konsep *al-Malā'* dalam Al-Qur'an sering kali diasosiasikan dengan elite yang mempertahankan status quo melalui kontrol sosial dan ekonomi, sehingga memperlihatkan dimensi dominasi yang cenderung eksklusif. Kontras antara kedua konsep tersebut membentuk oposisi semantik yang menegaskan kritik Al-Qur'an terhadap kekuasaan yang tidak berlandaskan nilai-nilai. Analisis Izutsu (2002) memperlihatkan bahwa oposisi ini membangun struktur makna yang memperjelas batas antara legitimasi dan penyimpangan dalam kekuasaan. Relasi oposisi tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan konteks ayat dan jaringan konsep yang menyertainya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dinamis tentang otoritas.

Paradigma otoritas dalam Al-Qur'an menunjukkan orientasi yang menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar instrumen kontrol. Struktur semantik yang terbentuk melalui relasi antara konsep-konsep kunci menunjukkan bahwa otoritas selalu dikaitkan dengan amanah dan akuntabilitas. Prinsip ini menggeser pemahaman tentang kekuasaan dari paradigma dominasi ke paradigma pelayanan. *Ūlī al-Amr* dituntut untuk menjalankan fungsi kepemimpinan secara etis dan adil. Relasi ini memperlihatkan adanya mekanisme internal dalam struktur makna Al-Qur'an yang mengontrol potensi penyimpangan kekuasaan. Analisis Izutsu membantu mengungkap bahwa setiap konsep yang berkaitan dengan otoritas selalu terhubung dengan nilai moral tertentu, sehingga

membentuk sistem etika yang koheren. Struktur ini menegaskan bahwa otoritas tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dan legitimasi kekuasaan bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan moralitas.

Dinamika pergeseran makna otoritas dalam jaringan konsep memperlihatkan fleksibilitas struktur semantik yang dibangun dalam Al-Qur'an. Makna *Ūlī al-Amr* dapat mengalami perluasan atau penyempitan tergantung pada relasinya dengan konsep lain seperti ketaatan, keadilan, dan amanah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa otoritas berkembang melalui interaksi dengan konteks konseptual yang lebih luas. Konsep *al-Malā'* juga mengalami transformasi makna ketika ditempatkan dalam relasi yang berbeda, sehingga dapat merepresentasikan berbagai bentuk elite dengan karakteristik yang beragam. Analisis Izutsu (2002) menegaskan bahwa makna suatu konsep tidak dapat dipahami secara isolatif, melainkan harus dipahami dalam keseluruhan jaringan semantik. Dinamika ini memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap konsep otoritas, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Penutup

Pemaknaan otoritas politik Al-Qur'an melalui pendekatan semantik Toshihiko Izutsu menyingkap konfigurasi konseptual yang menautkan struktur makna *Ūlī al-Amr* sebagai representasi otoritas normatif-legal yang berakar pada kepatuhan kolektif, serta *al-Malā'* sebagai simbol elite sosial yang kerap berasosiasi dengan dominasi, resistensi, dan konservatisme kekuasaan. Relasi keduanya membentuk dialektika otoritas yang tidak sekadar hierarkis, melainkan sarat ketegangan antara legitimasi berbasis nilai etis dan kecenderungan hegemonik elite. Formasi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengafirmasi kepemimpinan, melainkan juga mengkritisi struktur elite yang menyimpang dari prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Kontribusi teoretis ini menguatkan relevansi analisis semantik Izutsu bagi pengembangan tafsir tematik yang integratif dengan wacana politik Islam, sekaligus memperluas horizon epistemologis terkait konstruksi otoritas. Secara praktis, pemahaman ini menawarkan kerangka reflektif untuk pembacaan kritis terhadap relasi kuasa kontemporer. Keterbatasan tampak pada fokus tekstual dan kerangka semantik yang belum menyentuh dinamika historis-sosiologis secara mendalam. Agenda lanjutan perlu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, memperluas korpus ayat, serta menguji relevansi konsep ini dalam konteks politik modern yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. bin. (2024). Preachers and leaders in the Holy Qur'an (An objective study). *Anbar University Journal of Islamic Sciences*, 15(4), 2320–2363. <https://doi.org/10.34278/aujis.2024.185159>
- Abu Zayd, N. H. (2002). *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Leiden: Brill.

- Ahmed, H. (2025). Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications. *Journal of Law and Religion*, 40(1), 28–58. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056>
- Al-Jawharī, I. ibn Ḥammād. (1987). *Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah* (A. 'Abd al-G. 'Aṭṭār, ed.). Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- Arkoun, Mohammed. (2019). *Rethinking Islam*. Milton Park: Routledge.
- Arkoun, Muhammad. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press.
- Asy-Sya'rāwī, M. M. (1997). *Khawāṭirī Al-Qur'ān Al-Karīm Tafsīr Asy-Sya'rāwī*. Madinah: Akhbār al-Yaum.
- Azhdaryzadeh, H., & Amini, M. N. (2024). The Source of Social Conflict from the Perspective of the Holy Qur'an. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(2), 525. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5631>
- Badrun, M., Nasution, A., Afini, A., & Nurdiana, E. (2023). The Basic Structure of Qur'anic Worldview: An Analysis to Toshihiko Izutsu Concept of Weltanschauung. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 7(1), 191. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5696>
- Bahri, S., Naldi, A., Al-Mujtahid, N. M., & Rambe, R. F. A. K. (2024). The Intersection of Religion and Politics: A Systematic Literature Review. *Pharos Journal of Theology*, 105(3), 323. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.323>
- Bakour, B. (2025). Reconceptualizing Political Obedience in Islamic Thought. *American Journal of Islam and Society*, 42(1-2), 6–41. <https://doi.org/10.35632/ajis.v42i1-2.3428>
- Bhojani, A.-R., & Clarke, M. (2023). Religious Authority beyond Domination and Discipline: Epistemic Authority and Its Vernacular Uses in the Shi'i Diaspora. *Comparative Studies in Society and History*, 65(2), 272–295. <https://doi.org/10.1017/S0010417522000470>
- Dar, O. M. (2022). Obedience to 'Political Authority' (Ulū Al-Amr). *Australian Journal of Islamic Studies*, 7(1), 141–166. <https://doi.org/10.55831/ajis.v7i1.469>
- Duraković, E. (2023). Vlast i autoritet: je li moguća sakralizacija vlasti? *Znakovi vremena*, 26(94–95), 175–188. <https://doi.org/10.62125/2303-6826.2023.26.94-95.175>
- Haleem, M. A. S. A. (2006). The Qur'anic Employment of the Story of Noah. *Journal of Qur'anic Studies*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.3366/jqs.2006.8.1.38>
- Hazaymeh, O. M.-A. A. (2026). The Philosophy of Conflict and Political Dialogue in the Holy Qur'an: The Moses (A.S.)–Pharaoh Narrative in Historical Context and Contemporary Relevance. *Hamdard Islamicus*, 49(1), 9–25. <https://doi.org/10.57144/hi.v49i1.1346>
- Ibn Farīs, A. Ḥusayn A. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Manzūr, M. ibn M. ibn 'Alī A. al-F. J. al-D. (1999). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-

Ṣadr.

- Izutsu, T. (2002). *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Jeffery, A. (1958). *The Foreign Vocabulary of the Qur'an*. Baroda: Oriental Institute.
- Mir, M. (2011). *Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concept of Nazm in Tadabbur-i Qur'an*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Pratiwi, E. A. S., Othman, A., Daulay, R. H., Sahara, D., & Rahman, Z. (2026). Women's Leadership in the Quran: A Critical Analysis of Contemporary Muslim Interpretation and Social Practice. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 120–140. <https://doi.org/10.64691/ms4sxm74>
- Qutb, S. (2004). *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* (A. Yasin, A. H. al Kattani, I. A. Shomad, H. Heftri, A. D. Bashori, A. A. 'Izzi, ... Syihabuddin, ed.). Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica.
- Saptono, P. B., Khozen, I., & Jie, F. (2023). Obedience to Uli'l-Amr and Tax Compliance: Islamic Scholarly Perceptions. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 103–118. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.08>
- Sirry, M. (2021). Who Are Those in Authority? Early Muslim Exegesis of the Qur'anic Ulū'l-Amr. *Religions*, 12(7), 483. <https://doi.org/10.3390/rel12070483>
- Williamson, S., Yildirim, A. K., Grewal, S., & Kuenkler, M. (2023). Preaching Politics: How Politicization Undermines Religious Authority in the Middle East. *British Journal of Political Science*, 53(2), 555–574. <https://doi.org/10.1017/S000712342200028X>
- Yusuf, M., Mardan, M., Nahdhiyah, N., & Marjumi, K. N. (2021). Social Construction of The Elite in The Quran (Analysis of Term Al-Mala'). *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(1), 98–127. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i1.3374>